RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2019

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 050/615/Kpts/Per-UU/2018
Lampiran : 72 (tujuh puluh dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah setelah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2013-2018, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

Scanned by TapScanner

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan....

Scanned by TapScanner

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1055, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

21. Peraturan....

Scanned by TapScanner

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

32. Peraturan....

Scanned by TapScanner

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 43);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);

43. Peraturan....

Scanned by TapScanner

43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);
50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);

54. Peraturan.....

Scanned by TapScanner

54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 68);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:....

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLII Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang meliputi:
   1. persiapan penyusunan Rencana Strategis;
   2. penyusunan rancangan awal Rencana Strategis;
   3. penyusunan rancangan Rencana Strategis;
   4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
   5. perumusan rancangan akhir Rencana Strategis; dan
   6. penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
b. melakukan penyesuaian/menyusun perubahan Rencana Strategis, apabila Rencana Strategis mengalami perubahan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN

Tembusan:

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN XXXI KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 050/615/Kpts/Per-UU/2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

I. Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

III. Kelompok Kerja :

a. Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengkajian Peraturan:

1. Ketua : Kepala Bagian Legislasi dan Risalah.
2. Anggota :
   1. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
   2. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
   3. Kepala Sub Bagian Dukungan Penganggaran; dan
   4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
3. Pelaksana Teknis :
   1. Pelaksana pada Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
   2. Pelaksana pada Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
   3. Pelaksana pada Sub Bagian Dukungan Penganggaran; dan
   4. Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan:

1. Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Anggota :
   1. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
   2. Kepala Sub Bagian Risalah; dan
   3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
3. Pelaksana Teknis :
   1. Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Anggaran;
   2. Pelaksana pada Sub Bagian Risalah; dan
   3. Pelaksana pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

c. Bidang Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data:

1. Ketua : Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
2. Anggota :
   1. Kepala Sub Bagian Dukungan Pengawasan;
   2. Kepala Sub Bagian Verifikasi;

3. Kepala....

Scanned by TapScanner

3. Kepala Sub Bagian Umum; dan
4. Kepala Sub Bagian Persidangan.

3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Sub Bagian Dukungan Pengawasan;
2. Pelaksana pada Sub Bagian Verifikasi;
3. Pelaksana pada Sub Bagian Umum; dan
4. Pelaksana pada Sub Bagian Persidangan.

BUPATI BOGOR.

BUPATI BOGOR

ADE YASIN

Scanned by TapScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pengertian Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan berdasarakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD).

Renstra SKPD atau sekarang disebut Renstra Perangkat Daerah (PD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam ketentuan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Struktur Tata Pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun

penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, perlu kiranya menyesuaikan dengan perencanaan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Adapun proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mengikuti pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut : diawali dengan pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan/atau Renja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut, Ketua Tim yaitu Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Tim yaitu Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya, dan Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang mendukung visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terkait secara langsung mengacu kepada Renstra K/L maupun Renstra Provinsi Jawa Barat.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menjadi pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

1.1. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Pangjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor 2016-2036;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Sekretariat DPRD. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Sekretariat DPRD dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Peran (Tugas dan Fungsi) serta Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2018-2023

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasidan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesekretariatan DPRD;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Adapun unsur dan susunan orgnisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
   c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
   a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Verifikasi

4. Bagian Legislasi dan Risalah, membawahi :
   a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
   b. Sub Bagian Persidangan;
   c. Sub Bagian Risalah.
5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
   a. Sub Bagian Dukungan Penganggaran; dan
   b. Sub Bagian Dukungan Pengawasan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

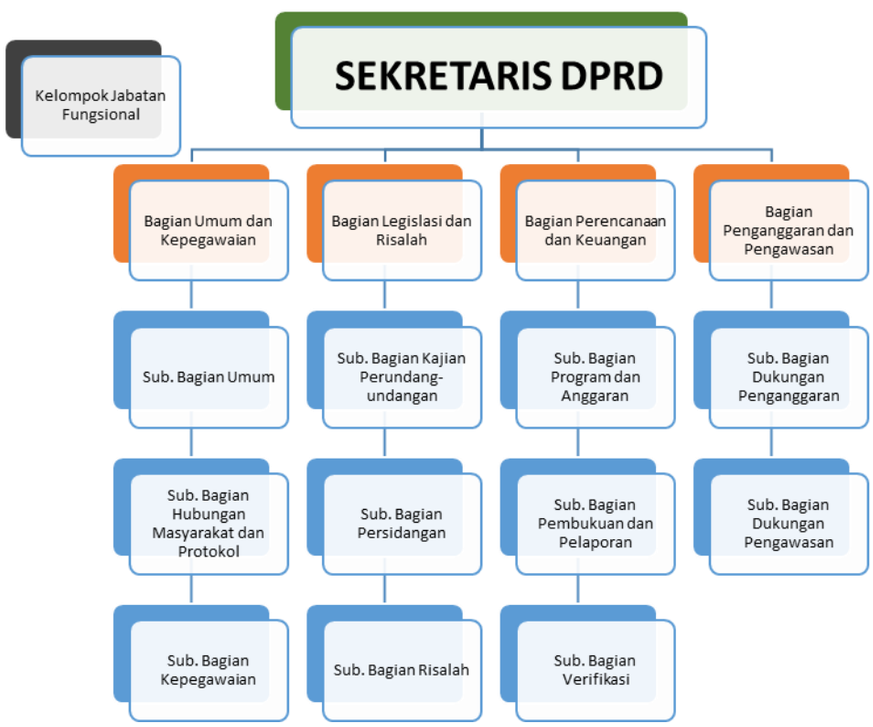

Adapun tugas pokok dan fungsi dari sekretaris dan masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Sekretariat DPRD

dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Admitrasi Kepegawaian;
b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c. Penyiapan Rencana Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai Bidang Tugasnya.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyelenggarakan pengelolaan program dan anggaran, pembukuan dan pelaporan serta verifikasi keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Pengelolaan Penyusunan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Penatausahaan Keuangan;
d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bagian Legislasi dan Risalah

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengkajian produk hokum, menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat DPRD.

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan, Mengolah, Mengkaji dan Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Produk Hukum;
b. Pelaksanaan Fasilitasi Rapat DPRD;
c. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD;
d. Pelaksanaan Penyusunan Risalah Rapat DPRD;
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Legislasi dan Risalah; dan
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dukungan terhadap tugas DPRD berkaitan dengan fungsi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Bahan Dukungan Penganggaran;
b. Pengelolaan Bahan Dukungan Pengawasan;
c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 160 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer dan sebagianya. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB. BOGOR

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	66	41,25
2.	Kontrak / Honorer	10	6,25
3.	Sukwan	1	0,625
4.	Tenaga diperbantukan	9	5,625
5.	Outsourcing Maintenance	4	2,50

6.	Tenaga Rekruitmen	28	17,50
7.	Tenaga Kebersihan	15	9,373
8.	Tenaga Ahli Fraksi	7	4,375
9.	Satuan Pengamanan	20	12,50
	Jumlah	160	100

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Kondisi PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2019 sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 36,36 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata 3 (S3) dan Sarjana Muda/D3 yaitu sebesar @1,52 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Pendidikan tahun 2019

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-3 (S3)	1	1,52
2.	Strata-2 (S2)	16	24,24
3.	Strata-1 (S1)	18	27,27
4.	Sarjana Muda/ D3	1	1,52
5.	SLTA/SMK	24	36,36
6.	SLTP	3	4,55
7.	SD	3	4,55
	Jumlah	**66**	**100**

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Sekretariat DPRD 54,55 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari pegawai negeri sipil yang bertugas di Sekretariat DPRD masih berpedidikan setara SLTA ke bawah.

2. Sumber Daya Asset/Modal

a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah luas 16.288 m2

b. Peralatan Kantor, diantaranya :

TABEL REKAP ASSET PERALATAN DAN MESIN SETWAN KONDISI 2018

Nomor	Jenis	Jumlah
1	AC Split	95
2	Alat Dapur lain-lain	604
3	Alat Komunikasi Telephone Lain-lain	10
4	Alat Pemanas	6
5	Alat Pembersih Lain-lain	1
6	Alat Penghancur Kertas	4
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	51
8	Audio Amplifier	27
9	Camera +Attachment	5
10	Dispenser	15
11	Faximile	5
12	Filling Kabinet Besi/Metal	7
13	Handy Cam	2
14	Handy Talky (HT)	15
15	Jeep	8
16	Kabel listrik	2
17	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	6
18	Kompor Gas	2
19	Kursi Biasa	1
20	Kursi Putar	200
21	Kursi Rapat	252
22	Laptop	7
23	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	17
24	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I /Wkl Gub/Bupati/Walikota	1
25	Lemari Es	3
26	Lemari Kayu	2
27	Lensa kamera	7
28	Meja Kerja	37
29	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
30	Meja Podium	1
31	Meja Rapat	63

32	Mesin Absen (Time Recorder)	3
33	Mesin Ketik Manual Longewagen	3
34	Mesin Kompresor	2
35	Mesin Penghisap Debu	1
36	Mesin Photo Copy dengan kertas double Folio	1
37	Mesin Potong Rumput	10
38	Meubelair Lain-lain	721
39	Microphone/Wireless Mic	2
40	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	37
41	Personal Komputer (P.C. Unit)	38
42	Personal Komputer lain-lain	18
43	Pesawat Telephone	5
44	Power Amplifier	97
45	Printer	46
46	Proyektor +Attachment	2
47	Rak Besi/Metal	10
48	Recorder Display Lain-lain	1
49	Scanner	2
50	Sepeda Motor	20
51	Slide Projector	3
52	Sofa	9
53	Sound System	8
54	Tustel/Camera Digital	2
55	TV Monitor	11
56	Unit Power Supply (UPS)	9
57	Vaccum Pump	2
58	White Board	2

TABEL KEBUTUHAN IDEAL YANG WAJIB DIPENUHI UNTUK MASING-MASING SUB BAGIAN

NO	Jabatan	Jumlah PNS Tahun 2019 (org)	Jumlah Kebutuhan PNS (org)	Lebih/ Kurang (org)	Keterangan
1	Sekretaris	1	1	-	terpenuhi
2	Kepala Bagian	3	4	-1	Kurang
3	Kepala Sub Bagian	11	11	-	terpenuhi
4	Staf sub Bagian Umum	13	16	-3	Kurang
5	Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	10	8	2	Lebih

6	Sub Bagian Kepegawaian	5	5	-	terpenuhi
7	Sub Bagian Program dan Anggaran	1	3	-2	Kurang
8	Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan	5	6	-1	Kurang
9	Sub Bagian Verifikasi	1	2	-1	Kurang
10	Sub Bagian Kajian Perundang-undangan	3	5	-2	Kurang
11	Sub Bagian Persidangan	1	3	-2	Kurang
12	Sub Bagian Risalah	2	2	-	terpenuhi
13	Sub Bagian Dukungan Penganggaran	4	4	-	terpenuhi
14	Sub Bagian Dukungan Pengawasan	6	7	-1	Kurang
	jumlah	**66**	**77**	**-11**	**Kurang**

Berdasarkan data di atas jumlah pegawai negeri sipil/ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan analisis Jabatan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Tabel berikut menyajikan tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Periode sebelumnya (2013-2018) menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2013-2018 (Lampiran)

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAJIB PENDUKUNG
BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Raperda		ada	ada	12	15	12			10	15	12			83%	100%	100%		
	Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban		ada	ada	3	3	3			3	3	3			100%	100%	100%		
	Jaring aspirasi masyarakat		ada	ada	24	48	48			24	48	48			100%	100%	100%		
	Raperda Inisiatif		ada	ada	2	1	5			2	1	5			100%	100%	100%		
	Sosialisasi produk hukum DPRD		ada	ada	2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%		
II	Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD							85%	85%				85%	85%				100%	100%

Tabel 2.1 menunjukkan tidak ada gap pelayanan, terlihat pada pencapaian Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu IKK (Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor) pada akhir tahun anggaran mencapai 100%.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor (Lampiran)

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016					2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
- PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA																	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
- BELANJA PEGAWAI	5.001.122.000	5.698.636.000	6.622.020.000	6.331.709.000	11.241.943.000	4.977.578.671	5.515.698.865	5.900.924.738	5.812.168.803	10.706.885.098	99,53%	96,79%	89,11%	91,79%	95,24%	25,83%	25,13%
B. BELANJA LANGSUNG																	
- BELANJA PEGAWAI	2.623.575.000	2.935.235.000	3.402.493.000	4.622.293.000	550.543.000	1.755.100.000	2.069.115.000	2.521.644.000	3.330.374.000	499.968.000	66,90%	70,49%	74,11%	72,05%	90,81%	-6,11%	-3,29%
- BELANJA BARANG DAN JASA	30.071.762.000	25.855.115.000	33.175.253.000	41.693.722.000	44.442.388.000	21.254.037.604	16.167.351.395	27.889.073.803	37.828.186.793	40.131.202.378	70,68%	62,53%	84,07%	90,73%	90,30%	11,64%	22,57%
- BELANJA MODAL	19.800.482.000	8.385.897.000	25.169.264.000	3.466.081.000	20.311.812.000	5.846.381.900	7.596.962.108	24.423.007.115	2.985.207.360	17.182.724.552	29,53%	90,59%	97,04%	86,13%	84,59%	135,57%	159,81%

Tabel 2.2 menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 s/d 2018 tidak mencapai 100%. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2014 s/d 2018 dapat dikatakan baik. Untuk Belanja Langsung, yaitu Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa sudah cukup baik terlihat dari rasio berkisar antara 62,5% s/d 97%, sedangkan Belanja Modal pada Tahun Belanja Langsung Tahun 2014 kurang baik yaitu 29,5% dikarenakan gagal lelang dalam kegiatan rehabilitasi gedung ruang Paripurna DPRD.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

1) Jumlah pegawai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi belum terpenuhi
2) Belum dilengkapi dengan piranti untuk melaksanakan SOTK sebagaimana mestinya (SOP, Uraian Tugas belum optimal, anjab belum dijalankan);
3) Perencanaan anggaran belum optimal.
4) Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal
5) Masih terbatasnya jumlah pegawai yang kreatif, inovatif dan berintegritas

2. Lingkungan Eksternal

1). Sering terjadinya perubahan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kedudukan, tupoksi, hak dan wewenang DPRD dan Pemda;

2). Dinamika kehidupan politik yang distabilitas;
3). Tuntutan dan kritikan masyarakat terhadap DPRD dan Setwan semakin kritis
4). Pelaksanaan pemilu pilpres, pileg dan pilkades.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tabel Berikut disampaikan pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan yang tinggi dari DPRD terhadap kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	SDM yang belum optimal	Sumber daya manusia yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi
			Kurangnya jumlah SDM yang sesuai Analisis Jabatan
			Belum adanya pembinaan tim kerja yang solid
		Sarana dan Prasarana	Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal
		Belum ada SOP	Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan permendagri Nomor 86 tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah "**TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN**".

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dala arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. **Termaju** adalah bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif. Bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di Tingkat Jawa Barat maupun Nasional.
3. **Nyaman** adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian, dan ramah untuk berinvestasi.
4. **Berkeadaban** adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluan yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi Pertama :
  Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
- Misi Kedua :
  Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Misi Ketiga :
  Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
- Misi Keempat :
  Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
- Misi Kelima :
  Mewujudkan kesalehan sosial

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi, Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban	tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (*UU No 23 Tahun 2014*)	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD masih belum optimal	Faktor penghambat: antara lain SDM, Sapras, Metode, Anggaran, Pimpinan dan Anggota DPRD, perubahan perundang-undangan/regulasi teknis Faktor pendorong : 1. sebagai fasilitator kemitraan pemda dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik 2. DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki tiga fungsi strategis yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan
2	Misi Ke- 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor kedududukannya tidak secara langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan tidak bertanggung jawab langsung juga terhadap pelaksanaan tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.

Tabel 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kab/ Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat: **Tujuan :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Jawa Barat **Program :** Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah. (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016)	Sinkronisasi agenda pemerintahan (antara pemerintah dan DPRD) belum optimal	**Faktor Penghambat** : Lemahnya koordinasi dan sosialisasi **Faktor Pendorong :** DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki tiga fungsi strategis yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA RPJMD

Sekretariat DPRD dalam pelayanan perangkat daerah tidak langsung berkorelasi dengan kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses perencanaan, isu-isu strategis merupakan mutlak harus ditentukan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 isu trategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD) dan sudah disepakati dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. SDM masih kurang dari kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan penyelenggaraan administrasi kesektretariatan dan keuangan.
2. Sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kegiatan masih kurang
3. Seringnya perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi penyelenggaraan kesekretariatan dan keuangan
4. Belum optimalnya tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019- 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

TUJUAN :	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

SASARAN : Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan target Sekretariat DPRD disajikan dalam tabel 4.1 Program Utama dan Program Penunjang berikut :

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1 Indikator Tujuan : Nilaii SAKIP Sekretariat DPRD	B	B	B	B	BB	A
		1 Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	2 Indikator Sasaran : Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	85%	86%	87%	88%	89%

PROGRAM KESEKRETARIATAN (PROGRAM PENUNJANG)

NO.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	-	-	65%	70%	75%	80%
		2	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	-	-	100%	100%	100%	100%
				3	persentase pelayanan kepegawaian	-	-	90%	91%	92%	93%
				4	Persentase Perencanaan sesuai target	-	-	90%	91%	92%	93%
				5	Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	-	-	90%	91%	92%	93%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut :

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
MISI 3	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	1	peningkatan dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan	1	Mengoptimalkan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan;
					2	Mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan tupoksi;
					3	Meningkatkan sinergitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Pada bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

A. Program Utama

I. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, indikator : *Jumlah workshop yang difasilitasi*

(program dan indikator ini hanya sampai dengan tahun 2019)

II. **Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda**, indikator:

1. *Persentase Raperda yang difasilitasi*

   (indikator ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 s.d 2023)

2. *Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD*

III. **Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**, indikator :

Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD

IV. **Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan**, indikator :

Jumlah fasilitasi kehumasan dan keptrokolan DPRD

(program dan indikator ini hanya sampai dengan tahun 2019)

B. Program Penunjang

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,

I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** indikator :

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan

II. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** indikator: *Persentase Kegiatan yang dilaksanakan*

III. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** indikator : *Persentase Kegiatan yang dilaksanakan*

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikator : *Persentase Kegiatan yang dilaksanakan*

V. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja,** indikator : *Persentase Kegiatan yang dilaksanakan*

Penentuan Program dan kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan 2023, ditetapkan sebagai berikut :

Program Utama :

I. Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda,

Indikator program :

1. *Persentase Raperda yang difasilitasi*
2. *Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD*

Kegiatan, meliputi :

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Penyelenggaraan Tugas Bapemperda
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
5. Rapat-rapat Paripurna
6. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor
7. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah
8. Penyusunan Rencana Kerja DPRD
9. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

II. Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Indikator program : *Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD*

Kegiatan, meliputi :

1. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran
2. Penyusunan bahan koordinasi, konsultasi dan studi banding komisi – komisi
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DPRD
4. Reses DPRD

5. Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD
6. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan

<u>Program Penunjang :</u>

I. Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD

Indikator program :

1. *Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan*
2. *Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas seluruh pegawai*
3. *Persentase pelayanan kepegawaian*

Kegiatan, meliputi :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Pengelolaan Aset Perangkat Daerah
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah
7. Pengelolaan Keamanan Kantor
8. Pengelolaan Kebersihan Kantor
9. Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
10. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pengadaan Peralatan Kantor
14. Pengadaan Perlengkapan Kantor
15. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional/Jabatan
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi
22. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

23. Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur
24. Pengadaan Pakaian Dinas
25. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
26. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
27. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

II. Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD

Indikator :

1. *Persentase Perencanaan sesuai target*
2. *Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target*

Kegiatan, meliputi :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
2. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyelenggaraan Verifikasi Perencanaan, Pertanggungjawaban Keuangan
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyusunan Perencanaan Anggaran
6. Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Uraian tentang program, capaian program, indikator output dan target 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran dari arah kebijakan dan mendukung program serta uraian tentang kegiatan, output, indikator output dan target 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran dari arah kebijakan dan mendukung program dalam ***lampiran tabel 6.1.***

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) untuk penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk indikator program pada Bab VI.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah "**PERSENTASE KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**" dengan capaian dan target tiap tahunnya ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	85%	85%	86%	87%	88%	89%	89%

Selanjutnya Indikator kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu, dengan target capaian tiap tahunnya, *sebagai berikut*:

A. Indikator Program Utama

1. Jumlah workshop yang difasilitasi
2. Presentase Raperda yang difasilitasi
3. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
4. Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD
5. Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolan DPRD

B. Indikator Program Penunjang

1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
3. Persentase pelayanan kepegawaian
4. Persentase Perencanaan sesuai target
5. Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target

Indikator kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor disajikan dalam tabel 7.2, *sebagai berikut* :

TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM UTAMA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah workshop yang difasilitasi	kali	7	7	-	-	-	-	
2	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	-	-	70%	75%	80%	85%	85%
3	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolan DPRD	kali	-	156	-	-	-	-	-

TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	-	-	65	70	75	80	80
3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	-	-	100	100	100	100	100
4	persentase pelayanan kepegawaian	%	-	-	90	91	92	93	93
5	Persentase Perencanaan sesuai target	%	-	-	100	100	100	100	100
6	Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	-	-	90	91	92	93	93

LAMPIRAN
TABEL-TABEL
RENSTRA

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAJIB PENDUKUNG

BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Ca	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Raperda		ada	ada	12	15	12			10	15	12			83%	100%
	Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban		ada	ada	3	3	3			3	3	3			100%	100%
	Jaring aspirasi masyarakat		ada	ada	24	48	48			24	48	48			100%	100%
	Raperda Inisiatif		ada	ada	2	1	5			2	1	5			100%	100%
	Sosialisasi produk hukum DPRD		ada	ada	2	2	2			2	2	2			100%	100%
II	Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan							85%	85%				85%	85%		
	Sekretariat DPRD															

paian pada Tahun		
2016	2017	2018
18	19	20
100%		
100%		
100%		
100%		
100%		
	100%	100%

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
- PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA																	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
- BELANJA PEGAWAI	5.001.122.000	5.698.636.000	6.622.020.000	6.331.709.000	11.241.943.000	4.977.578.671	5.515.698.865	5.900.924.738	5.812.168.803	10.706.885.098	99,53%	96,79%	89,11%	91,79%	95,24%	25,83%	25,13%
B. BELANJA LANGSUNG																	
- BELANJA PEGAWAI	2.623.575.000	2.935.235.000	3.402.493.000	4.622.293.000	550.543.000	1.755.100.000	2.069.115.000	2.521.644.000	3.330.374.000	499.968.000	66,90%	70,49%	74,11%	72,05%	90,81%	-6,11%	-3,29%
- BELANJA BARANG DAN JASA	30.071.762.000	25.855.115.000	33.175.253.000	41.693.722.000	44.442.388.000	21.254.037.604	16.167.351.395	27.889.073.803	37.828.186.793	40.131.202.378	70,68%	62,53%	84,07%	90,73%	90,30%	11,64%	22,57%
- BELANJA MODAL	19.800.482.000	8.385.897.000	25.169.264.000	3.466.081.000	20.311.812.000	5.846.381.900	7.596.962.108	24.423.007.115	2.985.207.360	17.182.724.552	29,53%	90,59%	97,04%	86,13%	84,59%	135,57%	159,81%

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1 Indikator Tujuan : Nilaii SAKIP Sekretariat DPRD	B	B	B	B	BB
		1 Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	2 Indikator Sasaran : Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	85%	86%	87%	88%

PROGRAM KESEKRETARIATAN (PROGRAM PENUNJANG)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	-	-	65%	70%	75%
		2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	2 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	-	-	100%	100%	100%
			3 Persentase pelayanan kepegawaian	-	-	90%	91%	92%

				4	Persentase Perencanaan sesuai target	-	-	100%	100%	100%
				5	Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	-	-	90%	91%	92%

2023
10
A
89%

2023
10
80%
100%
93%

100%
93%

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
MISI 3	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	1 peningkatan dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan	1 Mengoptimalkan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan; 2 Mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan tupoksi; 3 Meningkatkan sinergitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2023)		UNIT KERJA SKPD PENANG-	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023							
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.		
							Program Utama																		
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam	Terwujudnya peningkatan						**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN**	Produk Hukum Yang di selesaikan DPRD																	
rangka memfasilitasi setiap kegiatan	kelancaran untuk mendukung						**DAERAH**																		
Pimpinan dan Anggota DPRD	tugas dan fungsi DPRD dalam				15	0001	Pembahasan Rancanga perda Rancangan Perda	Jumlah Penetapan Dokumen Rancangan	69																
	Pembentukan Peraturan Daerah,							Perda	1																
	Pengangaran dan Pengawasan																								
					15	0002	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Da	- Jumlah Rapat Minggon Keliling (Boling)	61																
							Tokoh Masy./ Agama	- Jumlah saba desa (Jumling)																	
								- Jumlah Penerimaan Audiensi/Tamu																	
								Kuriker																	
								- Jumlah Laporan																	
					15	0003	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	~ Jumlah materi bahan rapat AKD	294																
								~ Jumlah rapat AKD	291																
								~ Jumlah peserta rapat AKD	8904																
								~ Jumlah laporan hasil rapat AKD	294																
					15	0003	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Materi Bahan Rapat																	
								- Jumlah Rapat Paripurna	87																
								- Jumlah Materi Bahan Rapat Paripurna	87																
								- Jumlah Laporan Hasil Rapat Paripurna	87																
					15	0007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	Jumlah peserta bimtek anggota DPRD	31																
								kali	4																
					15	0008	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Fraksi-Fraksi	- Jumlah tenaga ahli yang disediakan	49																
					15	0013	Rapat Paripuma Istimewa Hari Jadi Bogor	Terselenggaranya jumlah rapat Hari Jadi	4																
								Bogor -Laporan Hasil penyelenggaraan Hari																	
								Jadi Bogor																	
					15	0014	Kegiatan Reses Masa Sidang I	~ Jumlah reses	3																
								~ Jumlah Peserta																	
								-jumlah Laporan yang di susun																	
					15	0015	Kegiatan Reses Masa Sidang II	~ Jumlah reses	3																
								~ Jumlah Peserta																	
								-jumlah Laporan yang di susun																	
					15	0016	Kegiatan Reses Masa Sidang III	~ Jumlah reses	3																
								~ Jumlah Peserta																	
								-jumlah Laporan yang di susun																	
					15	0017	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi I	- Jumlah penyusunan materi kunker	89																
								- Jumlah kunjungan kerja	89																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	89																
					15	0018	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi II	- Jumlah penyusunan materi kunker	91																
								- Jumlah kunjungan kerja	91																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	91																
					15	0018	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi III	- Jumlah penyusunan materi kunker	78																
								- Jumlah kunjungan kerja	78																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	78																
					15	0020	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi IV	- Jumlah penyusunan materi kunker	85																
								- Jumlah kunjungan kerja	85																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	85																
					15	0024	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran																		
								- Jumlah Perda APBD yang dihasilkan	12																
					15	0025	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Badan Kehormata	- Jumlah penyusunan materi kunker	32																
								-Jumlah kunjungan kerja	32																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	32																
					15	0026	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	- Jumlah penyusunan materi kunker	19																
								-Jumlah kunjungan kerja	19																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	19																
					15	0027	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD	- Jumlah penyusunan materi kunker	166																
								-Jumlah kunjungan kerja	206																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	166																
					15	0028	Rapat Dengar Pendapat Diskusi Publik (Komisi I, II III, dan IV)	Jumlah Rapat	9																
								Jumlah Peserta	1665																
								Jumlah Laporan	9																
					15	0029	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD dalam Daerah	- Jumlah penyusunan materi kunker	255																
								- Jumlah kunjungan kerja	255																
								- Jumlah Laporan Hasil kunker	255																
					15	0031	Penyediaan Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar	Jumlah Tenaga Ahli yg direkrut	4																
					15	0032	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Rekomendasi	2																
Meningkatnya penataan peraturan							**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANG**	Perda Inisiatif	10																
perundang - undangan di Sekretariat																									
DPRD					23	0002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Per. UU	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	13																
								Jumlah penyusunan materi																	
								penunjang keg Balegda/ NA																	
								Jumlah kunjungan kerja penunjang keg	34																
								Balegda																	
								Jumlah Laporan kegiatan penunjang keg	34																
								Balegda																	
					23	0003	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	- Jumlah Renja DPRD yang disusun	4																
								Jumlah Buku	430																
					23	0004	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Buku Keputusan	200																
								Buku Keputusan																	
								Jumlah Buku Perda Inisiatif	1000																
								Jumlah Buku Tatib DPRD																	
							Program Penunjang																		
							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																		
				01		0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan:																	
								~ telepon	30																
								~ listrik	10																
								~ air	6																
								~ TV Berlangganan																	
				01		0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	Jumlah dokumen STNK kendaraan																	
							/Operasional	dinas/operasional yang diperbaharui :																	
								~ Roda 4	223																
								~ Roda 2	94																

| | | |

					02.0038		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jumlah jaringan komputer yang dipelihara	1																						
					02.0071		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara:																						
								Sound system																							
								Wireless																							
								Handycam																							
								Camera																							
								LCD																							
Meningkatnya kinerja pelayanan admini	Terwujudnya Disiplin dan						**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**																								
perkantoran	Kewibawaan Aparatur																														
					03.0001		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	4																						
								~Jumlah PSH																							
								~Jumlah PSL																							
								~Jumlah PDH lengan panjang																							
								~Jumlah PDH lengan pendek																							
								~Jumlah PSR																							
								~Jumlah PSH aparatur																							
								~Jumlah Pakaian Olahraga																							
					03.0003		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Lapangan beserta Perlengkapannya yang disediakan	132																						
Meningkatnya kinerja sumberdaya apar	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas						**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**																								
	dan Kinerja Sumberdaya Aparatur																														
					05.0003		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	~ Jumlah peserta bintek	246																						
					05.0005		Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian	218																						
							PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																								
					06.0001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	1 70																						
								1. LAKIP																							
								2. JANKIN																							
								3. JANKIN PERUBAHAN																							
								3. LKPJ																							
					06.0002		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	10																						
								1. Semester I	350																						
								2. Semester II																							
					06.0004		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	7 200																						
					06.0005		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran	4 50																						
								1. DPA																							
								2. RKA																							
								3. RKA Perubahan																							
								4. DPPA																							
					06.0006		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	60																						
					06.0014		Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	6 190																						
					06.0010		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	206																						
					06.0012		Dokumentasi dan Penatasan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen dan arsip keuangan	17																						
							Program Utama																								
1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga	1 Terwujudnya peningkatan kelancara	**40**	**0**	**4**	**11**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT**					**4.200.000.000**		**3.976.875.000**																	
Perwakilan Rakyat Daerah dalam	fasilitasi kepada Pimpinan dan																														
Penyelenggaraan Pemerintahan	anggota DPRD dalam menjalankan					0001	Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pelaksanaan bimtek DPRD yang difasilitasi		6	Kegiatan/Laporan	4.200.000.000		3.976.875.000																Sekretariat DPRD	Cibinong
	fungsinya							Jumlah kegiatan Bimtek/Workhop		1	Kegiatan/Laporan																				
								Jumlah pelaksanaan bimtek DPRD yang difasilitasi		6	Kegiatan/Laporan																				
								Jumlah kegiatan Bimtek/Workhop:		1	Kegiatan/Laporan																				
		40	**0**	**4**	**12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN**	1 Presentase Raperda yang difasilitasi				**9.282.387.000**																			
								2 Tersediannya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten																							
						0001	Pengelolaan Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Pembahasan raperda yang di fasilitasi		7	kali (Perda,Pert & Dok. Persetujuan)	4.229.100.000																			
								jumlah Notulensi rapat		7	dokumen																				
						0002	Pengelolaan Penyusunan rancangan Peraturan daerah	Jumlah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang di fasilitasi		3	Kali	1.700.000.000																			
								Jumlah notulensi rapat		3	Dokumen																				
						0003	Pengelolaan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perda yang di fasilitasi		4	Kali	257.199.000																			
								Jumlah laporan		3450	Dokumen																				
								Jumlah kegiatan sosialisasi perda yang di fasilitasi		4	Kali																				
								Jumlah laporan		3450	Dokumen																				
						0004	Pengelolaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Difasilitasi		63	Kali	549.560.000																			
								Jumlah Notulensi Rapat		63	Kali																				
						0005	Pengelolaan Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna		14	kali	838.902.000																			
								Jumlah Notulensi Rapat		14	Kali																				
						0006	Pengelolaan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	jumlah Rapat Hari Jadi Bogor yang difasilitasi		1	Kali	429.925.000																			
										1	Dokumen																				
						0007	Pengelolaan Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah Yang Difasilitasi		4	Kali	782.711.000																			
								Jumlah Notulensi Rapat		4	Dokumen																				
								Jumlah Rapat Badan Musyawarah Yang Difasilitasi		4	Kali																				
								Jumlah Notulensi Rapat		4	Dokumen																				
						0009	Pengelolaan Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renja DPRD Yang di fasilitasi		1	Kali	494.990.000																			
										1	Dokumen																				
		40	**0**	**4**	**13**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN**					**14.650.871.000**																			
						0001	Pengelolaan Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran	Jumlah notulensi Rapat		6	Dokumen	3.305.448.000																			
								Jumlah laporan kunjungan kerja		6	Laporan																				
						0002	Penyusunan bahan koordinasi, konsultasi dan studi banding komisi I	Laporan koordinasi, Konsultasi dan Studi banding		13	Laporan	1.990.055.000																			
								Rekomendasi koordinasi, Konsultasi dan Studi banding		13	Rekomendasi																				

| | | |

					0002	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Lapangan beserta perlengkapannya yang disediakan		5	Jenis	24.205.000																			
					0003	Pengadaan Kartu Pengenal	~Jumlah Kartu Tanda Anggota DPRD		55	Buah	27.000.000																			
							~Jumlah Kartu Pengenal Pegawai Sekretariat DPRD		150	Buah																				
		40	0	4	.04		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**				**340.872.000**																			
					0001	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimtek		3	Jenis	239.372.000																			
					0003	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimbingan Mental dan Rohani bagi Aparatur		2	Kegiatan	101.500.000																			
		40	0	4	.05		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN**				**628.220.000**																			
					0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor		1	dokumen	74.058.000																			
									70	buku																				
					0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran:		2	dokumen	50.000.000																			
									100	buku																				
					0003	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD		2	jenis	50.000.000																			
					0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran		6	Jenis	161.318.000																			
							Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran		6	Jenis																				
					0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan		12	Laporan	128.767.000																			
					0006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan		16	Dokumen	61.800.000																			
					0008	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD		2	Dokumen	48.189.000																			
					0009	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Renstra yang disusun		1	Dokumen	54.088.000																			
Meninokatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Pengangaran dan Pengawasan	40	0	4	.21		**Program Utama**																							
							Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda	**1 Persentase Raperda yang difasilitasi**				**70**	**%**	**23.016.779.000**	**75**	**%**	**28.181.316.154**	**80**	**%**	**23.250.232.760**	**85**	**%**	**19.940.671.505**	**85**	**%**	**94.388.999.419**	**Setwan**	Cibinong
								2 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan				**Ada**			**Ada**			**Ada**			**Ada**			**Ada**					
								ada setiap																						
								Alat-alat Kelenokaqan DPRD Kabupaten																						
					.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah:	Jumlah Pembahasan raperda yang di fasilitasi					10	kali	11.027.704.000	10	kali	13.404.931.914	10	kali	10.607.438.076	10	kali	8.313.728.502	40		43.353.802.492	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Notulensi Rapat					90	kali		90	kali		90	kali		90	kali		360		-			
					.002	Penyelenqaraan Tugas Baqemperda:	Jumlah Perda Inisiatif					4	Raperda Inisiatif	4.357.176.000	4	Raperda Inisiatif	5.278.038.770	4	Raperda Inisiatif	4.326.388.686	4	Raperda Inisiatif	3.687.436.808	16		17.649.040.264	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Penyusunan Materi Penunjang Kegiatan Baqemperda					5	Naskah Akademik		5	Naskah Akademik		5	Naskah Akademik		5	Naskah Akademik		20		-			
							Jumlah Kunjungan Kerja Penunjang Kegiatan Baqemperda					66	Laporan Kunjungan Kerja		66	Laporan Kunjungan Kerja		66	Laporan Kunjungan Kerja		66	Laporan Kunjungan Kerja		264		-			
							Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Kegiatan Baqemperda					12	Laporan rapat		12	Laporan rapat		12	Laporan rapat		12	Laporan rapat		48		-			
					.003	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan:	jumlah buku keputusan					350	Buku	196.040.000	350	Buku	237.471.867	350	Buku	194.654.804	350	Buku	165.906.796	1400		794.073.467	**Setwan**	Cibinong
							jumlah buku perda inisiatif					350	Buku		350	Buku		350	Buku		350	Buku		1400		-			
							jumlah buku tatib DPRD					350	Buku		350	Buku		350	Buku		350	Buku		1400					
					.004	Rapat-rapat Alat Kelenokapan Dewan:	Jumlah Materi Bahan Rapat AKD					125	Buah	647.440.000	125	Buah	784.272.524	125	Buah	642.865.262	125	Buah	547.922.344	500		2.622.500.130	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Rapat AKD					125	kali		125	kali		125	kali		125	kali		500		-			
					.005	Rapat-rapat Paripurna:	Jumlah Rapat-rapat Paripurna					18	kali	472.210.000	18	kali	572.008.725	18	kali	468.873.417	18	kali	399.626.854	72		1.912.718.996	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Notulensi Rapat					18	kali		18	kali		18	kali		18	kali		72		-			
					.006	Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor:	Jumlah Rapat Hari Jadi Bogor yang Difasilitasi					1	kali	430.000.000	1	kali	520.877.857	1	kali	426.961.669	1	kali	363.904.930	4		1.741.744.496	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Notulensi Rapat					1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		4					
					.007	Penyelenqaraan Tugas Badan Musyawarah:	Jumlah Kunjungan Kerja					5	kali	1.006.370.000	5	kali	1.219.060.207	5	kali	999.259.103	5	kali	851.681.406	20		4.076.370.716	**Setwan**	Cibinong
							Rapat Kerja Penyusunan Agenda 1 Tahun Masa Sidang					1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		4		-			
					.008	Penyusunan Rencana Kerja DPRD:	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renja DPRD Yang di fasilitasi							902.964.000			902.964.000			700.000.000			562.107.743	0		3.068.035.743		
					.009	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD:	Jumlah Pelaksanaan Bimtek DPRD yang Difasilitasi					5	Kegiatan / Laporan	3.976.875.000	5	Kegiatan / Laporan	4.587.565.196	5	Kegiatan / Laporan	4.175.718.750	5	Kegiatan / Laporan	4.384.504.688	20		17.125.063.634	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Kegiatan Bimtek/Workshop					5	Kegiatan / Laporan		5	Kegiatan / Laporan		5	Kegiatan / Laporan		5	Kegiatan / Laporan		20		-			
							Jumlah Laporan					10	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen		40		-			
							jumlah laporan					125	Dokumen		125	Dokumen		125	Dokumen		125	Dokumen		500					
					.001	Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD:	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD yang difasilitasi					10	Kali	596.690.000	10	Kali	550.669.154	10	Kali	708.072.993	10	Kali	663.851.434	40		2.519.283.581	**Setwan**	Cibinong
					.003	Penyusunan Materi Publikasi Kinerja DPRD:	Jumlah Materi Publikasi yang disiapkan					2	Edisi	528.791.000	2	Edisi	488.006.993	2	Edisi	627.499.317	2	Edisi	488.309.950	8		2.132.607.260	**Setwan**	Cibinong
		40	0	4	.22		**Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:**	**Tersedianya dokumen fungsi pengangqaran dan pengawasan DPRD**				**Ada**		**15.896.001.000**	**Ada**		**13.560.874.063**	**Ada**		**13.311.538.912**	**Ada**		**10.198.169.196**	**Ada**		**52.966.643.171**	**Setwan**	Cibinong
																								0		-			
					.001	Penyelenqaraan Tugas Badan Anqqaran:	Jumlah Notulensi Rapat					6	Dokumen	3.185.561.000	6	Dokumen	2.717.590.952	6	Dokumen	2.368.267.222	6	Dokumen	2.043.707.053	24		10.315.126.227	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran yang difasilitasi					6	Kali		6	Kali		6	Kali		6	Kali		24		-			
					.002	Penyusunan bahan koordinasi, konsultasi dan studi banding komisi - komisi:	Jumlah bahan koordinasi, konsultasi, dan studi banding Komisi-komisi yang di fasilitasi					48	Laporan/rekomendasi	8.015.630.000	48	Laporan/rekomendasi	6.838.105.929	48	Laporan/rekomendasi	5.959.124.246	48	Laporan/rekomendasi	5.142.453.578	192		25.955.313.753	**Setwan**	Cibinong
					.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DPRD:	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang di fasilitasi					11	Laporan/Rekomendasi	445.991.000	11	Laporan/Rekomendasi	380.473.363	11	Laporan/Rekomendasi	331.566.674	11	Laporan/Rekomendasi	286.126.381	44		1.444.157.418	**Setwan**	Cibinong
					.004	Reses DPRD:	Jumlah Penyelenqaraan Reses					2	Kali	3.600.439.000	2	Kali	3.071.521.923	2	Kali	2.676.703.308	2	Kali	2.309.873.387	8		11.658.537.618	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah Laporan					2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		8		-			
					.005	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD:	Jumlah Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD yang difasilitasi					1	Laporan	11.310.000	1	Laporan	9.648.521	1	Laporan	8.408.284	1	Laporan	7.255.967	4		36.622.772	**Setwan**	Cibinong
					.010	Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan:	Jumlah Penyelenqaraan tuga badan kehormatan yang di fasilitasi					5	rekomendasi	637.130.000	5	rekomendasi	543.533.375	5	rekomendasi	473.666.678	5	rekomendasi	408.752.830	20		2.063.082.883	**Setwan**	Cibinong
					.002	Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRD:	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi					125	Kali	730.030.000	125	Kali	673.725.054	125	Kali	866.303.183	125	Kali	812.199.740	500		3.082.257.977	**Setwan**	Cibinong
																								0		-			
							Program Penunjang																	0		-			
																								0					
		40	0	4	.05		**Program Penoelolaan Umum dan Keqeqawaian Sekretariat DPRD**	**1 Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**65**	**%**	**10.938.589.000**	**70**	**%**	**11.485.518.459**	**75**	**%**	**12.059.794.373**	**80**	**%**	**12.662.784.091**	**80**	**%**	47.146.685.914	**Setwan**	Cibinong
								2 Persentase Pemenuhan Sarana dan				**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**	-		
								Prasarana yang berkualitas untuk seluruh																					
								pegawai																					
								3 persentase pelayanan kepegawaian				**90**	**%**		**91**	**%**		**92**	**%**		**93**	**%**		**93**	**%**			
					.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:	~jumlah rekening yang dibayarkan					3	jenis	1.225.200.000	3	jenis	1.286.460.000	3	jenis	1.350.783.000	3	jenis	1.418.322.150	3	jenis	5.280.765.150	**Setwan**	Cibinong
							Listrik					3	Jaringan		3	Jaringan		3	Jaringan		3	Jaringan		12		-			
							Air					1	Jaringan		1	Jaringan		1	Jaringan		1	Jaringan		4		-			
							Telepon					7	Jaringan		7	Jaringan		7	Jaringan		7	Jaringan		28		-			
					.002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran Harian Lokal					55000	Eksemplar	500.000.000	55000	Eksemplar	525.000.000	55000	Eksemplar	551.250.000	55000	Eksemplar	578.812.500	220000		2.155.062.500	**Setwan**	Cibinong
							Koran Harian Nasional					27500	Eksemplar		27500	Eksemplar		27500	Eksemplar		27500	Eksemplar		110000		-			
							Majalah Mingguan					5280	Eksemplar		5280	Eksemplar		5280	Eksemplar		5280	Eksemplar		21120		-			
							Majalah Bulanan					1320	Eksemplar		1320	Eksemplar		1320	Eksemplar		1320	Eksemplar		5280		-			
							Tabloid Mingguan					2640	Eksemplar		2640	Eksemplar		2640	Eksemplar		2640	Eksemplar		10560		-			
							Buku Peraturan Perundang-undangan					57	Buku		57	Buku		57	Buku		57	Buku		228					
					.003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor:	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia					8	Jenis	745.597.000	8	Jenis	782.876.850	8	Jenis	822.020.693	8	Jenis	863.121.727	32		3.213.616.270	**Setwan**	Cibinong
					.004	Penyediaan Makanan dan Minuman:	Jumlah jamuan makanan dan minuman + snack untuk rapat					4000	Box	255.810.000	4000	Box	268.600.500	4000	Box	282.030.525	4000	Box	296.132.051	16000		1.102.573.076	**Setwan**	Cibinong
							Jumlah jamuan makanan dan minuman + snack untuk tamu					8448	Box		8448	Box		8448	Box		8448	Box		33792		-			
					.011	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah:	dokumen aset yang dihimpun					6	dokumen	108.750.000	6	dokumen	114.187.500	6	dokumen	119.896.875	6	dokumen	125.891.719	24		468.726.094	**Setwan**	Cibinong
					.012	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah:	Tersedianya ATK untuk pengelolaan Dokumentasi dan Arsip					6	Jenis	50.560.000	6	Jenis	53.088.000	6	Jenis	55.742.400	6	Jenis	58.529.520	24		217.919.920	**Setwan**	Cibinong
							Terjamunya Makanan dan minuman untuk kegiatan penataan arsip untuk 11 Bulan (9 orang x 11 Bulan)					198	Box		198	Box		198	Box		198	Box		792		-			
							Terjamunya Snack dan minuman untuk kegiatan penataan arsip untuk 11 Bulan (9 orang x 11 Bulan)					198	Box		198	Box		198	Box		198	Box		792		-			
							Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja untuk 1 Tahun					1	Orang		1	Orang		1	Orang		1	Orang		4		-			
					.013	Pengelolaan Keamanan Kantor:	Jumlah Petugas Keamanan Kantor					20	Orang	612.045.000	20	Orang	642.647.250	20	Orang	674.779.613	20	Orang	708.518.593	80		2.637.990.456	**Setwan**	Cibinong
					.014	Pengelolaan Kebersihan Kantor:	Terbayarnya Jasa Petugas kebersihan dalam 1 tahun					15	Orang	567.918.000	15	Orang	596.313.900	15	Orang	626.129.595	15	Orang	657.436.075	60		2.447.797.570	**Setwan**	Cibinong
							Tersediannya alat -alat kebersihan					25	Jenis		25	Jenis		25	Jenis		25	Jenis		100		-			
							Terjaganya kebersihan karpet (Ruang rapat dan Ruang Kerja)					2	Are		2	Are		2	Are		2	Are		8		-			

						.015	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor (Roda 4)				35	Unit	81.000.000	35	Unit	85.050.000	35	Unit	89.302.500	35	Unit	93.767.625	140		349.120.125	**Setwan**	Cibinong
								Terbayarnya pajak kendaraan bermotor (Roda 2)				20	Unit		20	Unit		20	Unit		20	Unit		80		-		
						.022	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang disusun				1	dokumen	68.741.000	1	dokumen	72.178.050	1	dokumen	75.786.953	1	dokumen	79.576.300	4		296.282.303	**Setwan**	Cibinong
						.043	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mesin Penghancur Kertas				5	Unit	199.675.000	5	Unit	209.658.750	5	Unit	220.141.688	5	Unit	231.148.772	20		860.624.209	**Setwan**	Cibinong
								Almari				4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		16		-		
								Brangkas				4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		16		-		
								Filling Kabinet				11	Buah		11	Buah		11	Buah		11	Buah		44		-		
								Meja Kerja				15	Buah		15	Buah		15	Buah		15	Buah		60		-		
								Kursi Kerja				30	Buah		30	Buah		30	Buah		30	Buah		120				
						.044	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kamet Mushola (1Roll = 1,2m x 6m)				12	Roll	39.875.000	12	Roll	41.868.750	12	Roll	43.962.188	12	Roll	46.160.297	48		171.866.234	**Setwan**	Cibinong
						.045	Pengadaan Peralatan Kantor	Komputer/PC				5	Unit	177.000.000	5	Unit	185.850.000	5	Unit	195.142.500	5	Unit	204.899.625	20		762.892.125	**Setwan**	Cibinong
								komputer notebook				4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		16		-		
								Printer				4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		16		-		
								Scanner				1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		4		-		
						.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				61	Jenis	580.928.000	61	Jenis	609.974.400	61	Jenis	640.473.120	61	Jenis	672.496.776	244		2.503.872.296	**Setwan**	Cibinong
								Jumlah Jenis Cetak				22	Jenis		22	Jenis		22	Jenis		22	Jenis		88		-		
								Terpenuhinya pengandaan/Fotocopy				1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		4		-		
						.047	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Baterry kering)				33	Jenis	201.905.000	33	Jenis	212.000.250	33	Jenis	222.600.263	33	Jenis	233.730.276	132		870.235.788	**Setwan**	Cibinong
								Terbiayainya Jasa tenaga Kerja selama 1 tahun				4	Orang		4	Orang		4	Orang		4	Orang		16		-		
						.082	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jenis pemeliaharaan gedung kantor				4	Kegiatan	316.395.000	4	Kegiatan	332.214.750	4	Kegiatan	348.825.488	4	Kegiatan	366.266.762	16		1.363.701.999	**Setwan**	Cibinong
						.084	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perunjang Gedung Kantor	Terpeliharanya Genset				2	Unit	579.144.000	2	Unit	608.101.200	2	Unit	638.506.260	2	Unit	670.431.573	8		2.496.183.033	**Setwan**	Cibinong
								Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja dalam 1 tahun				4	Orang		4	Orang		4	Orang		4	Orang		16		-		
								Terpeliharanya Taman dan Halaman Kantor (area gedung kantor)				1	Area		1	Area		1	Area		1	Area		4		-		
								Terpeliharanya pagar dan tanaman (Area gedung kantor)				1	Area		1	Area		1	Area		1	Area		4		-		
						.085	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara				5	Mobil	477.850.000	5	Mobil	501.742.500	5	Mobil	526.829.625	5	Mobil	553.171.106	20		2.059.593.231	**Setwan**	Cibinong
								Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara				30	Unit		30	Unit		30	Unit		30	Unit		120		-		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara (Roda 2)				20	Unit		20	Unit		20	Unit		20	Unit		80		-		
						.086	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya AC				115	Unit	98.000.000	115	Unit	102.900.000	115	Unit	108.045.000	115	Unit	113.447.250	460		422.392.250	**Setwan**	Cibinong
								Terpeliharanya Audio Visual				1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		4		-		
								Terpeliharanya Alat alat studio				10	Unit		10	Unit		10	Unit		10	Unit		40		-		
						.087	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Printer				20	Unit	78.000.000	20	Unit	81.900.000	20	Unit	85.995.000	20	Unit	90.294.750	80		336.189.750	**Setwan**	Cibinong
								Terpeliharanya Scanner				1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		4		-		
								Terpeliharanya Komputer Notebook				25	Unit		25	Unit		25	Unit		25	Unit		100		-		
								Terpeliharanya Komputer PC				30	Unit		30	Unit		30	Unit		30	Unit		120		-		
						.088	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Terpeliharanya Jaringan Internet				1	Jaringan	125.000.000	1	Jaringan	131.250.000	1	Jaringan	137.812.500	1	Jaringan	144.703.125	4		538.765.625	**Setwan**	Cibinong
								Terpeliharanya Jaringan CCTV				1	Jaringan		1	Jaringan		1	Jaringan		1	Jaringan		4				
						.101	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang dibayarkan				12	Orang	1.330.500.000	12	Orang	1.397.025.000	12	Orang	1.466.876.250	12	Orang	1.540.220.063	48		5.734.621.313	**Setwan**	Cibinong
								Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan				7	Orang		7	Orang		7	Orang		7	Orang		28		-		
								Jumlah tenaga ahli/kelompok pakar yang dibayarkan				17	Orang		17	Orang		17	Orang		17	Orang		68		-		
						.102	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimbingan Mental dan Rohani bagi Aparatur				2	Kegiatan	120.000.000	2	Kegiatan	126.000.000	2	Kegiatan	132.300.000	2	Kegiatan	138.915.000	8		517.215.000	**Setwan**	Cibinong
						.103	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan				5	Jenis	550.000.000	5	Jenis	577.500.000	5	Jenis	606.375.000	5	Jenis	636.693.750	20		2.370.568.750	**Setwan**	Cibinong
						.104	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola				250	Dokumen	78.500.000	250	Dokumen	82.425.000	250	Dokumen	86.546.250	250	Dokumen	90.873.563	1000		338.344.813	**Setwan**	Cibinong
						.105	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimtek				3	Jenis	1.660.196.000	3	Jenis	1.743.205.800	3	Jenis	1.830.366.090	3	Jenis	1.921.884.395	12		7.155.652.285	**Setwan**	Cibinong
						.108	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Peserta Medical Check Up				55	Pimpinan dan Anggota	110.000.000	55	Pimpinan dan Anggota	115.500.000	55	Pimpinan dan Anggota	121.275.000	55	Pimpinan dan Anggota	127.338.750	220		474.113.750	**Setwan**	Cibinong
																								0		-		
		40	0	4	06		**Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD**	**1 Persentase Perencanaan sesuai target**				**90**	**%**	**3.387.559.000**	**91**	**%**	**3.556.936.950**	**92**	**%**	**3.734.783.798**	**93**	**%**	**3.921.522.987**	**93**	**%**	14.600.802.735	**Setwan**	Cibinong
								2 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target				**90**	**%**		**91**	**%**		**92**	**%**		**93**	**%**		**93**	**%**			
																								0				
						.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran				2	dokumen	100.003.000	2	dokumen	105.003.150	2	dokumen	110.253.308	2	dokumen	115.765.973	8		431.025.430	**Setwan**	Cibinong
								Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		4		-		
						.002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan				12	Laporan	128.770.000	12	Laporan	135.208.500	12	Laporan	141.968.925	12	Laporan	149.067.371	48		555.014.796	**Setwan**	Cibinong
						.003	Penyelenggaraan Verifikasi Perencanaan, Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Laporan Verifikasi Perencanaan Pertanggungjawaban Keuangan				1	Laporan	295.000.000	1	Laporan	309.750.000	1	Laporan	325.237.500	1	Laporan	341.499.375	4		1.271.486.875	**Setwan**	Cibinong
						.004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor				1	dokumen	74.076.000	1	dokumen	77.779.800	1	dokumen	81.668.790	1	dokumen	85.752.230	4		319.276.820		Cibinong
												70	Buku		70	Buku		70	Buku		70	Buku		280		-		
																								0		-		
						.005	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan Anggaran				6	Jenis	301.166.000	6	Jenis	316.224.300	6	Jenis	332.035.515	6	Jenis	348.637.291	24		1.298.063.106	**Setwan**	Cibinong
																								0		-		
						.006	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD				2	Dokumen	1.155.805.000	2	Dokumen	1.213.595.250	2	Dokumen	1.274.275.013	2	Dokumen	1.337.988.763	8		4.981.664.026	**Setwan**	Cibinong
								Jumlah Dokumen Renja DPRD				1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		4		-		
																								0		-		
						.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan				16	Dokumen	507.114.000	16	Dokumen	532.469.700	16	Dokumen	559.093.185	16	Dokumen	587.047.844	64		2.185.724.729	**Setwan**	Cibinong
																								0				
						.010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan Dalam Daerah				405	hok	825.625.000		hok	866.906.250		hok	910.251.563		hok	955.764.141	405		3.558.546.953	**Setwan**	Cibinong
								jumlah perjalanan Luar Daerah				499	hok			hok			hok			hok		499		-		

TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	85%	85%	86%	87%	88%	89%	89%

IND

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	20
				TARGET
1	2	3	4	9
IV.6	SEKRETARIAT DEWAN			
1	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	70,00
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada
2	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak	ada
3	Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	65,00
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100
		persentase pelayanan kepegawaian	%	90,00
4	Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Perencanaan sesuai target	%	100,00
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00

Tabel 7.3
IKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
)20	2021		2022		2
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET
10	11	12	13	14	15
54.191.535.000		54.191.535.362		54.191.535.362	
24.142.260.000	75,00	28.181.316.154	80,00	23.250.232.650	85,00
	ada		ada		ada
16.626.091.000	ada	14.599.550.211	ada	13.311.538.913	ada
10.938.589.000	70,00	9.279.061.160	75,00	15.759.903.559	80,00
	100		100		100
	91,00		92,00		93,00
2.484.595.000	100,00	2.131.607.837	100,00	1.869.860.241	100,00
	91,00		92,00		93,00

023	KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Rp.	TARGET	Rp.	
16	17	18	19
49.191.535.362		211.766.141.087	
20.089.019.811	85,00	95.662.828.615	Setwan
	ada		Setwan
11.350.331.181	ada	55.887.511.304	Setwan
16.118.842.579	80,00	52.096.396.298	Setwan
-	100,00		Setwan
-	93,00		Setwan
1.633.341.792	100,00	8.119.404.870	Setwan
	93,00		Setwan

IND

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	20
				TARGET
1	2	3	4	9
IV.6	SEKRETARIAT DEWAN			
1	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	70,00
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada
2	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak	ada
3	Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	65,00
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100
		persentase pelayanan kepegawaian	%	90,00
4	Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Perencanaan sesuai target	%	100,00
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00

Tabel 7.3
IKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
)20	2021		2022		2
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET
10	11	12	13	14	15
54.191.535.000		54.191.535.362		54.191.535.362	
24.142.260.000	75,00	28.181.316.154	80,00	23.250.232.650	85,00
	ada		ada		ada
16.626.091.000	ada	14.599.550.211	ada	13.311.538.913	ada
10.938.589.000	70,00	9.279.061.160	75,00	15.759.903.559	80,00
	100		100		100
	91,00		92,00		93,00
2.484.595.000	100,00	2.131.607.837	100,00	1.869.860.241	100,00
	91,00		92,00		93,00

023	KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Rp.	TARGET	Rp.	
16	17	18	19
49.191.535.362		211.766.141.087	
20.089.019.811	85,00	95.662.828.615	Setwan
	ada		Setwan
11.350.331.181	ada	55.887.511.304	Setwan
16.118.842.579	80,00	52.096.396.298	Setwan
-	100,00		Setwan
-	93,00		Setwan
1.633.341.792	100,00	8.119.404.870	Setwan
	93,00		Setwan